



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Telp/Fax (022)6642733
website: <https://diskominfo.cimahikota.go.id> e-mail: diskominfo@cimahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOTA CIMAHI

NOMOR 067/029/IKPS/ 2024

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

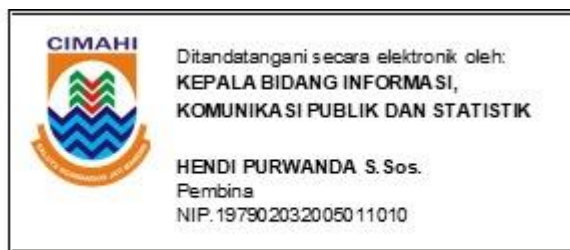
- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- MENGINGAT** : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 067/027/IKPS/2024

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 6.067/032/IKPS/2023 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 07 Maret 2024

**KEPALA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK
DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI
SELAKU PPID UTAMA**



LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI
PUBLIK

Daftar Informasi Yang Dikecualikan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	BATAS WAKTU
1.	Informasi Persandian 1. Dokumen Persandian 2. Daftar Internet Protokol (Kode Akses elektronik,) 3. Daftar User & Password perangkat jaringan	• Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 25,31 dan 40 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal, pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
2.	Informasi Pemerintahan Data-data yang berkaitan dengan rahasia Pemerintah/Negara	• UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara • Peraturan Menteri Dalam Negri No. 16 Tahun 2011 tentang KOMINDA (Komunitas Intelegen Daerah)	Membahayakan Pemerintahan atau Negara	Melindungi Data Pemerintah/Negara	1 Tahun
3.	Informasi Hukum Daftar orang yang terlibat Organisasi Terlarang	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	1 Tahun

4.	Informasi Kesekretariatan Biodata orang Perpustakaan yang memuat Nama, Alamat, NIK, No. Telepon, Email	UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 2 huruf e	Penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggungjawab dalam pemanfaatan layanan Dinas Perpustakaan dan Arsip	Perlindungan data pribadi	1 Tahun
5.	Informasi Keuangan dan Asset - Dokumen Pemanfaatan BMN - Dokumen Inventarisasi BMN - Laporan hasil audit pemeriksaan Khusus - Laporan hasil Pengawasan Internal - Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa - Proses Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk penyelesaian senggah	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pemendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah • UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	• Menimbulkan pro kontra di kalangan Masyarakat terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN • Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait • Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan yang tidak sehat	• Memastikan keamanan pemanfaatan dan pemindahtanganan sarana prasarana BMN • Melindungi para pihak yang terlibat kontrak • Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggungjawabkan	1 Tahun atau sampai dengan penandatanganan perjanjian kontrak
6.	Informasi Inspektorat - Dokumen Pemeriksaan, Review, dan Evaluasi - Dokumen Tindak Lanjut hasil Pemeriksaaan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26	Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	• Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara • Membantu badan publik dalam Menyusun kebijakan	1 Tahun
7.	Informasi Kepegawaian - Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dalam proses dikatuhi hukuman - Data usulan pengangkatan, proses mutase PNS dalam jabatan structural dan fungsional - Usulan formasi CASN	• UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian • Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008	• Mengungkap data ASN yang bersifat rahasia • Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	• Melindungi data ASN yang bersifat rahasia • Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	1 Tahun Atau sampai penyerahan Surat Keputusan
8.	Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Data Client jaringan Dinas	• Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/merubah bentuk jaringan yang	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari	1 Tahun

	Dukcapil - Tipologi dan konfigurasi jaringan LAN Dinas Dukcapil - Daftar User dan Password perangkat jaringan LAN Dinas Dukcapil - Data Aplikasi yang diakses oleh instansi	tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • Pasal 54 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	ada	pihak yang tidak bertanggungjawab	
9.	Informasi Kesehatan Dokumen terkait kefarmasian dan alat kesehatan	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Mengungkap riwayat medis pengobatan fisik dan psikis seseorang	Melindungi riwayat medis pengobatan fisik dan psikis seseorang	1 Tahun
10.	Informasi Sosial, Tenaga Kerja, dan UMKM - Data pribadi orang asing dan tenaga kerja asing - Data pribadi tenaga kerja - Struktur dan Skala Upah	• UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah	• Mengungkap data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia • Mengungkap data Perusahaan yang bersifat rahasia	• Melindungi data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia • Melindungi data Perusahaan yang bersifat rahasia	1 Tahun
11.	Lingkungan Hidup - Proses penyelidikan & penyidikan terhadap pelanggaran hukum dan Perda - Proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	• Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	• Menghambat proses penegakan hukum • Menghambat proses penyelesaian sengketa	• Kelancaran proses penegakan hukum • Kelancaran proses penyelesaian sengketa	1 Tahun
12.	Informasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data keuangan, asset dan design bangunan	• Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap dokumen rahasia Perusahaan/perorangan	Melindungi dokumen rahasia Perusahaan/perorangan	1 Tahun

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI
PUBLIK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Informasi Berkala

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Informasi Tentang Profil Badan Publik; Berisi tentang kedudukan, domisili, alamat lengkap Pemerintah Daerah Kota Cimahi	PPID Utama	Sekretariat Daerah	Tahun 2001	Hard dan Softcopy	Selama berlaku
2.	Ringkasan Tentang Informasi Program dan atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Dalam Lingkup Badan Publik; Berisi tentang Daftar program dan kegiatan lembaga perangkat daerah	PPID Utama	Bappeda	Setiap Awal Tahun	Hard dan Softcopy	5 Tahun
3.	Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik; Berisi tentang Laporan kinerja pemerintah daerah	PPID Utama	BPPKAD	Setiap Awal Tahun	Hard dan Softcopy	5 Tahun

4.	Informasi Laporan Keuangan yang telah diaudit; Berisi tentang Laporan-laporan pertanggung jawaban/ realisasi penggunaan anggaran pemerintah daerah	PPID Utama	BPPKAD	Setiap Awal Tahun	Hard dan Softcopy	5 Tahun
5.	Informasi Ringkasan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik; Memuat antara lain : 1) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik 3) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak; serta 4) Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik.	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2011	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku
6.	Informasi Khusus Lain yang Berkaitan dengan Hak-Hak Masyarakat; Menyajikan jenis-jenis pelayanan yang dimiliki oleh jajaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Organisasi Perangkat Daerah	PPID Utama	Lembaga teknis terkait	Tahun 2011	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku
7.	Informasi Tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik; Memuat alur permohonan, syarat permohonan dan pengajuan keberatan	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2011	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku

8.	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik; Memuat antara lain : 1. Sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya 2. Sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya 3. Anggaran layanan Informasi Publik 4. Laporan penggunaan anggaran.	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2011	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku
9.	Informasi tentang Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa; Memuat daftar paket pelelangan yang terdiri dari : 1. Nama lelang, 2. Tanggal pembuatan 3. Lingkup pekerjaan 4. Tahap lelang saat ini 5. Satuan kerja 6. Kategori 7. Metode Pengadaan 8. Metode dokumen 9. Tahun anggaran 10. Nilai Pagu Paket dan HPS 11. Jenis Kontrak 12. Lokasi Pekerjaan 13. Syarat Kualifikasi dan 14. Peserta Lelang	PPID Utama	Bagian Pengadaan Barang Jasa SETDA	Tahun 2011	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku
10.	Informasi Tentang Ketenagakerjaan; Informasi tentang penerimaan dan proses seleksi terbuka pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota	PPID Utama	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2011	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku

	Cimahi					
11.	Informasi yang sedang diproses dan regulasi yang telah disahkan/ditetapkan ; Memuat antara lain : 1) Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dan 2) Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan	PPID Utama	Bagian Hukum SETDA	Tahun 2011	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku

- **Keterangan : Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi yang harus tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat dalam format ini.**

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Informasi Serta Merta

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Layanan pengaduan melalui Email	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2011	https://webmail.cimahikota.go.id	Selama Berlaku
2.	Layanan pengaduan melalui SP4N Lapor	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2011	https://www.lapor.go.id	Selama Berlaku
3.	Layanan pengaduan melalui SMS	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2011	www.pesduk.cimahikota.go.id	Selama Berlaku
4.	Pengaduan Langsung	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2011	Datang langsung ke Diskominfo Kota Cimahi	Selama Berlaku

- Keterangan : Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi yang harus tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat dalam format ini.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

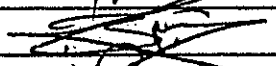
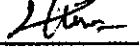
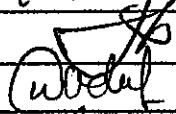
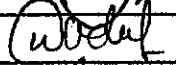
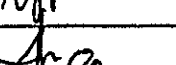
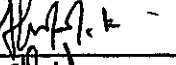
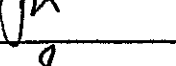
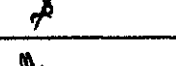
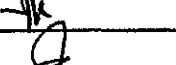
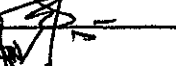
Informasi Tersedia Setiap Saat

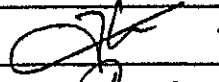
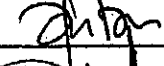
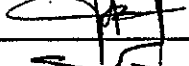
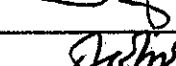
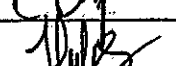
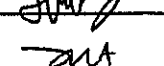
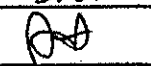
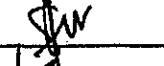
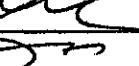
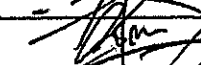
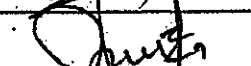
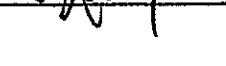
No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Draft/Rancangan Daftar Informasi Publik Kota Cimahi ; Berisi tentang Informasi - informasi publik yang tersedia secara berkala, serta merta, setiap saat & dikecualikan	PPID Utama	PPID Kota Cimahi			
2.	Daftar Informasi Publik PPID Pembantu Kota Cimahi; Berisi tentang Informasi - informasi publik yang tersedia secara berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan di tingkat OPD	PPID Utama	Lembaga Teknis Terkait			

- Keterangan : Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi yang harus tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat dalam format ini.**

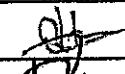
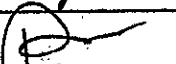
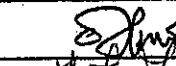
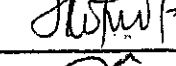
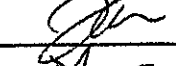
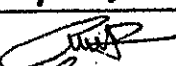
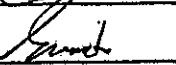
**KEPALA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK
DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI
SELAKU PPID UTAMA**

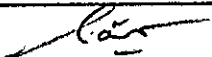


NO	NAMA	SKPD	Tanda Tangan
1	Yolla Kemala Munif	Puskemas Lewungajah	
2	Ruliat, S.pd. SP	K3S. Cimahi Selatan	
3	SUGIMAN	Disman	
4	Aep Desi	K3S Cimahi Utara	
5	Andini. M	PKM Melong Arah	
6	Purwati	PKM Cibeureum	
7	Anisa	Disman	
8	Yeni Eliana	PKM Cibeureum	
9	Yayan M	PKM Cimahi Tengah	
10	Saeftullah	DPMPTSP	
11	Budiman Alimudin	DPMPTSP	
12	Dani. z	cim teng	
13	Zalfaa	PKM Melong Tengah	
14	CEPI. SUPRIANA	Bappektbangda	
15	Nenda Ch	PKPSMD	
16	Ria	BKPSDMD	
17	ENRI. Y	Puskemas Padaruker	
18	Febby R. SRG	Dinsus	
19	Geuis Hondrayati	PKM. Cigugur tengah	
20	Yuce Wulandari	Puskemas Cimahi Selatan	

NO	NAMA	SKPD	Tanda Tangan
21	Emmy Erawati	Pusk Pasirkaliki	
22	Ieda Kurniati L	KSS Cimeng	
23	Annisa Darmawan	Puskemas Gmahi Utara	
24	Intan Rachmawati	PKM Cipageran	
25	Angur	DPKP	
26	Doni R	BPRD	
27	Lia Yuliat	BPKAD	
28	Ebi	INSPEKTORAT	
29	WISNU ASMORE PUTRA	DISDAKOPERIN	
30	Ruwita	RSUD Gbabat	
31	Annisa F	RSUD Gbabat	
32	Dyah A	DLH	
33	Deisty N	Puskemas Cireureup	
34	Anisa	DP3AP2KB	
35	HADI . K	DISKOMINFO JABAR	
36	Soni m	Kec. Utara	
37	Iman Hermawan	Kec. Cimsel	
38	Fajar Cahya Rindi	Prms Kesehatan	
39	Bayu Halim Firdaus	DISKOMINFO JABAR	
40	Dadan Fardana	Disbud	

ada

NO	NAMA	SKPD	Tanda Tangan
41	Si Hartati	DPUPR	
42	Pitman. G	Setwan	
43	Jayang	Setwan	
44	Septian F	DMSOS	
45	Asep Jamaludin M	MKK5 SMP	
46	Hendri Fan	DPKP	
47	Ucey Prfnp A	BAPPENSDA	
48	Ruk Dini F	Akelimzli	
49	Lita Shinta K	Diskominfo	
50	Ayu Wulandari	Diskominfo	
51	Sawingha Ercal Pangesti	Diskominfo	
52	Dian D v	Diskominfo	
53	Fentri n.	Diskominfo	
54	Sri. K	-	
55	Putri Rahmayati Karhika	Diskominfo	
56	Rano Hardiana D	Diskominfo	
57	Akbar Rapsanjani	Diskominfo	
58	Budi Sulstions	Diskominfo	
59	Sandi Faisal	Diskominfo	
60	Siti Alisya Ningsih	Diskominfo	

NO	NAMA	SKPD	Tanda Tangan
61	Nanda Shopia Nur Ihsan	Diskominfo	
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			